



Kekerasan Negara dalam Konflik Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia : Perspektif Pemberitaan Media

State Violence in Indonesian Conservation Area Conflict Management: Perspectives from The Media

M. Danang Anggoro^{1*}, San Afri Awang², Purwo Santoso³, & Lies Rahayu Wijayanti Faida⁴

¹Pascasarjana S3 Program Studi Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 55281

²Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 55281

³Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 55281

⁴Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 55281

*Email :danang77@gmail.com

HASIL PENELITIAN

Riwayat Naskah :

Naskah masuk (received): 12 November 2018

KEYWORD

state violence, dimensions of violence, conflict, conservation areas

KATA KUNCI

kekerasan negara, dimensi-dimensi kekerasan, konflik, kawasan konservasi

ABSTRACT

The imposition of conservation areas by the state through violence caused prolonged conflict in the management of conservation areas in Indonesia. Therefore, the need to understand and manage conflict as a holistic process guides this research, in which the goal is to better understand the dimensions of state violence. This research complements previous studies that are more focused on superficial symptoms, which have not fully been able to uncover the invisible level that make up the dimensions of violence. This study uses online media, namely Kompas Online, which represents the general media, as well as Mongabay, which represents environmental media, including news related to conflicts in conservation areas for the period of 2011 - 2017. State violence in the news is described in the dimensions of violence using content analysis. The content analysis is carried out in this study and follows a framework for simplified content analysis from Krippendorf (2004) and Istantia (2010) with the aim of conducting descriptive content analysis intended to describe a particular message or text (Rossy and Wahid, 2015), which is focused on the dimensions of state violence in the management of conservation areas. The dimensions of state violence can be fairly intact through the perspective of news in the mass media. This is helpful for better understanding conflicts that involve relations between the state and local communities due to the control of the management of conservation areas as a natural resource. To address the conflict, support is needed to find the identity of conservation area management through a cultural approach so as to build optimism that conflicts in the management of conservation areas can be handled properly.

INTISARI

Pemaksaan konservasi oleh negara kepada masyarakat melalui kekerasan disadari menimbulkan konflik yang berkepanjangan dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menyingkap dimensi-dimensi kekerasan negara tersebut dalam rangka untuk memahami dan mengelola konflik tersebut secara utuh. Penelitian

ini akan melengkapi telaah-telaah sebelumnya yang lebih terfokus pada gejala-gejala permukaan, dan tidak menjangkau secara utuh tataran yang tidak kasat mata sebagai dimensi-dimensi kekerasan yang justru lebih menentukan. Penelitian ini menggunakan obyek analisis pemberitaan media dalam jaringan yaitu Kompas Online yang mewakili media umum dan Mongabay yang mewakili media lingkungan, yang memuat pemberitaan terkait konflik di kawasan konservasi periode 2011 - 2017. Pemberitaan media tersebut dipelajari menggunakan analisis isi untuk mengungkap dimensi-dimensi kekerasan negara. Analisis isi yang dilakukan dalam penelitian ini mengikuti kerangka kerja pada analisis isi yang disederhanakan dari Krippendorf (2004) dan Istania (2010) dengan tujuan melakukan analisis isi deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan suatu pesan atau teks tertentu (Rossy & Wahid2015), yang dalam hal ini difokuskan pada dimensi-dimensi kekerasan negara dalam pengelolaan kawasan konservasi. Dimensi-dimensi kekerasan negara dapat cukup utuh diuraikan melalui perspektif pemberitaan di media massa. Hal tersebut sangat membantu untuk lebih memahami konflik yang melibatkan hubungan antara negara dan masyarakat yang disebabkan penguasaan pengelolaan kawasan konservasi sebagai sumber daya alam. Untuk menangani konflik tersebut diperlukan dukungan untuk menemukan jati diri pengelolaan kawasan konservasi melalui pendekatan kultural sehingga membangun optimisme bahwa konflik dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat ditangani dengan baik.

©Jurnal Ilmu Kehutanan - All right reserved

Pendahuluan

Konflik dalam pengelolaan kawasan hutan di Indonesia termasuk kawasan konservasi telah menyebar. Awang (2007) memberi isyarat bahwa konflik telah mewarnai dinamika dalam hubungan negara dengan rakyat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Baginya cara mengelola hutan, terkait erat dengan cara mengelola negara dan cara rakyat berhubungan dengan negara. Oleh karena itu Awang (2007), menyarankan agar pembahasan pengelolaan sumber daya hutan melibatkan telaah tentang hubungan negara dengan rakyat. Konflik-konflik yang melibatkan negara dengan rakyat terkait dengan pengelolaan kawasan hutan telah banyak dikaji. Wulan et al. (2004) menyebutkan bahwa dalam rentang tahun 1997–2003, 34% dari keseluruhan kasus konflik kawasan hutan di Indonesia berlangsung di kawasan konservasi (didalamnya termasuk konflik-konflik yang terjadi di kawasan hutan lindung dan taman nasional).

Konflik yang berlangsung, sebagaimana dijelaskan oleh Fisher et al. (2000), sering kali melibatkan tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk. Kekerasan yang terjadi dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah persoalan yang tidak sederhana dan juga kompleks. Merujuk Redpath et al. (2013), konflik konservasi adalah situasi saling berbenturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang berbeda opini terkait objek konservasi. Definisi ini mengarahkan publik untuk memahami konflik konservasi yang terjadi antara masyarakat dengan entitas negara yang pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk relasi sosial yang kompleks.

Pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia menjadi domain negara melalui instrumen-instrumen kebijakan. Dalam kerangka domain negara tersebut menjadikan negara sebagai kuasa dominan. Relasi kuasa negara atas kawasan konservasi inilah yang digunakan sebagai pembenaran dalam

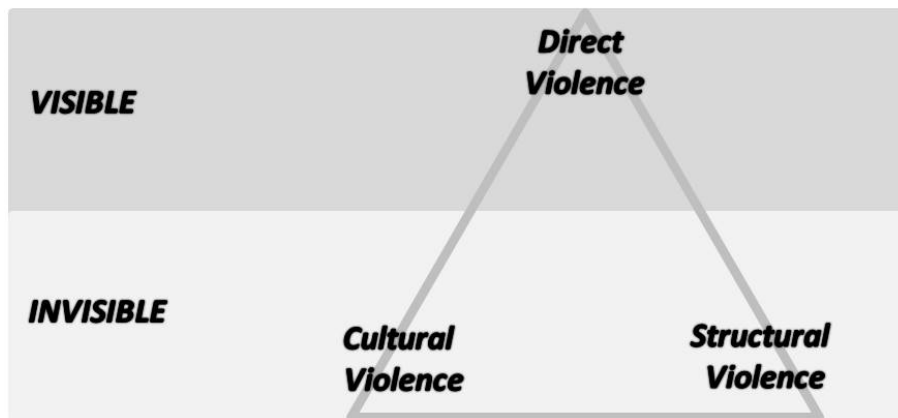
pemaksaan dan penggunaan kekerasan kepada rakyat atas nama konservasi (Peluso 1993) dan melalui pemikiran tersebut praktik-praktik kekerasan negara mendapat pembenaran. Konflik dan kekerasan merupakan hal yang jamak dalam pengelolaan kawasan konservasi, untuk itu Peluso (1993) menyarankan agar ideologi konservasi barat yang membenarkan kekerasan dalam pengelolaan kawasan konservasi perlu segera dikaji ulang.

Konflik berhubungan dengan kekerasan, akan tetapi keduanya merupakan substansi yang berbeda (Jacoby 2008). Fisher et al. (2000) memberikan pengertian konflik sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan, sedangkan kekerasan didefinisikan sebagai tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan dan/atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh. Kekerasan negara sendiri menurut Alimahomed – Wilson dan Williams (2016) merupakan istilah yang bersifat oksimoronik karena negara pada dasarnya bersifat kekerasan. Meskipun kontradiktif, sebagaimana dijelaskan oleh Weber (1946) hubungan antara negara dan kekerasan adalah hal yang sangat intim, negara dianggap sebagai satu-satunya sumber 'hak' untuk menggunakan kekerasan.

Pemahaman mengenai kekerasan negara dalam penelitian ini dikembangkan menggunakan kerangka kerja konseptual yang disediakan oleh Cecilia Menjivar dalam Alimahomed – Wilson dan Williams (2016), kemudian diperluas dengan dimensi kekerasan yang digambarkan melalui model segitiga kekerasan Galtung (2004). Jika biasanya pemikiran mengenai kekerasan selalu berasosiasi dengan kekerasan fisik seperti pemukulan penyerangan bahkan pembunuhan, maka kekerasan negara disini dapat terdiri dari beberapa cara dimana negara dapat

memberlakukan kekerasan dalam bentuk lain terhadap individu dan masyarakat. Pemahaman terhadap bentuk-bentuk kekerasan negara ini, menurut Menjivar (2016), akan memberikan analisis multifaset berbagai bentuk kekerasan, sehingga memungkinkan untuk menghubungkan antara kekerasan struktural (makro) yang merupakan hasil dari sistem sosial yang tidak setara dengan bentuk-bentuk kekerasan interpersonal (mikro) yang dilakukan oleh negara atau lainnya, yang berasal dari struktur sosial yang lebih luas.

Perluasan kerangka kerja konseptual Menjivar, dilakukan melalui penambahan dimensi kekerasan kultural (Galtung 2004) dalam kerangka kerja tersebut. Sebenarnya kekerasan fisik dan kekerasan struktural dalam kerangka kerja konseptual Menjivar telah ada dalam teori Galtung, akan tetapi belum secara spesifik digunakan untuk menguraikan kekerasan negara. Galtung (2004), memetakan dimensi kekerasan yang digambarkan melalui model segitiga kekerasan “*Conflict Triangle*” atau “*Violence Triangle*”.³ (tiga) kategori yang seringkali disebut sebagai dimensi-dimensi kekerasan yaitu, *direct violence (behavioral)*, *cultural violence (social construct)* dan *structural violence*. Masing-masing kategori merepresentasikan masing-masing sudut the violence triangle (segitiga kekerasan), yang oleh Galtung dijelaskan dalam *built-in vicious cycles* (struktur bagian siklus kekerasan). Lebih lanjut, Galtung membagi struktur dimensi-dimensi kekerasan ini ke dalam dua kategori, yaitu *visible (nampak/kongkrit)* dan *invisible (tak nampak/abstrak)*, bentuk dasar model teori tersebut seperti terlihat pada gambar 1 (Galtung 1990/2004).



Gambar 1. Segitiga konflik/kekerasan galtung
Figure 1. Galtung conflict triangle/violence triangle

Menurut Galtung: efek *visible* (nampak) dari *direct violence* (kekerasan langsung) dapat diketahui, seperti: pembunuhan, melukai, pemindahan properti, perusakan material, dan semua bentuk penyerangan terhadap warga. Tetapi efek *invisible* dapat terjadi lebih menyakitkan. Menarik untuk dicatat bahwa, meskipun aspek kultural dan struktural tidak nampak, Galtung menunjukkan fakta bahwa aspek ini memainkan peran yang sangat penting, baik selama masa pencegahan maupun masa rehabilitasi konflik. Ia menyatakan bahwa kekerasan kultural dan struktural menyebabkan kekerasan langsung yang melibatkan aktor kekerasan menggunakan kultur untuk melegitimasi penggunaan kekerasan sebagai instrumen yang dapat digunakan. (Galtung 2004; Ridwan 2009). Hal tersebut menegaskan bahwa dalam penanganan konflik, dimensi-dimensi tersebut harus dapat disentuh secara utuh.

Pesan kunci yang kita ambil dari Galtung adalah bahwa dalam rangka mengelola konflik konservasi, keberadaan dimensi-dimensi kekerasan ini perlu dipahami secara mendalam. Hal ini tidak hanya penting untuk mendapatkan gambaran yang utuh untuk mengurai konflik dalam pengelolaan kawasan konservasi, namun juga penting agar dapat menemukan langkah-langkah strategis yang diperlukan. Sebagai tambahan dalam menemukan langkah-langkah strategis yang diperlukan tersebut,

bahwa untuk menghubungkan antara kekerasan struktural dengan kekerasan kultural, menurut Galtung kekerasan struktural didampingi oleh kekerasan kultural, akan membuat struktur eksploitasi “terlihat, bahkan terasa benar – atau setidaknya tidak salah dan sehingga menghalangi subyeknya untuk mengembangkan kesadaran mengenai suatu situasi konflik (Jacoby 2008). Uraian-uraian tersebut sebelumnya menjadi landasan konseptual penting dalam memahami penelitian ini.

Lebih lanjut, Peluso (1993) menjelaskan bahwa pemaksaan konservasi kepada rakyat oleh negara seringkali dijalankan melalui berbagai kebijakan yang diterapkan melalui pendekatan militeristik. Pendekatan kebijakan semacam ini membawa konsekuensi pada eskalasi kekerasan, hilangnya kontrol sumberdaya lokal dan pengetahuan lokal mengenai pengelolaan sumber daya. Dalam relasi kuasa semacam inilah konflik negara dengan rakyat dalam pengelolaan kawasan konservasi terlegitimasi dan terjaga melalui dimensi-dimensi kekerasan yang dilakukan oleh negara..

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menyingkap dimensi-dimensi kekerasan negara yang menyisakan ketidaktuntasan penanganan konflik dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Penelitian ini akan melengkapi telaah-telaah sebelumnya (Kuswijayanti et al. 2007; Nasution 2008; Prabowo et al. 2010, Marina

& Dharmawan 2011; Winarwan et al. 2011; Cahyono, 2012). Keutuhan pemahaman dimensi-dimensi kekerasan negara ini, diharapkan memberikan manfaat untuk melengkapi khasanah pengetahuan dan masukan bagi pengembangan keilmuan pengelolaan kawasan konservasi terutama mengenai konflik beserta atribut-atribut sosial dalam pengelolaan kawasan konservasi serta dapat menjadi bahan dalam perbaikan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi.

Bahan dan Metode

Kekerasan negara terhadap masyarakat yang menjadi topik kajian utama dalam tulisan ini yakni kekerasan negara yang terjadi dalam pengelolaan kawasan konservasi dan dipublikasikan melalui media massa dalam jaringan (*daring/online*). Pemberitaan media bukan sekadar memberitakan peristiwa kekerasan. Ada kecenderungan media melakukan konstruksi realitas atas tindak kekerasan yang dialami masyarakat (Hasanah 2013). Konstruksi realitas kekerasan oleh media inilah yang akan dieksplorasi dan ditampilkan pada kajian ini sehingga kajian ini disebutkan dalam kerangka perspektif pemberitaan media.

Penelitian ini menggunakan bahan pemberitaan media dalam jaringan yaitu Kompas *Online* yang mewakili media umum dan Mongabay yang mewakili media lingkungan, yang memuat pemberitaan terkait konflik di kawasan konservasi periode 2011 - 2017. Kedua media dalam jaringan tersebut, dinilai memiliki peredaran yang luas, rating yang tinggi dan sering dijadikan rujukan dalam pemberitaan-pemberitaan lainnya. Pencarian pemberitaan menggunakan kata kunci konflik kawasan konservasi, konflik cagar alam, konflik suaka margasatwa, konflik taman nasional, konflik taman wisata alam, konflik taman buru dan konflik tahura (taman hutan raya).

Kekerasan negara dalam pemberitaan media dikategorikan menjadi kekerasan langsung/fisik, kekerasan struktural dan kekerasan kultural mengikuti Galtung (1990; 2004) dan Ridwan (2009), yang kemudian didefinisikan mengikuti Ignas Kladen dalam Manik (2003) sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik/langsung yaitu penggunaan kekuatan fisik berupa ancaman senjata, teror, intimidasi, penculikan atau pemenjaraan (penahanan paksa) untuk memaksakan kehendak penguasa dan menekan serta membatasi kehendak pihak lain. Kekerasan langsung dalam pemberitaan ditandai dari munculnya teks-teks yang memiliki makna yang menunjukkan aktivitas kekerasan fisik aparat negara terhadap masyarakat.
2. Kekerasan struktural yaitu sering juga disebut sebagai dominasi (Kladen dalam Manik 2003). Kekerasan jenis ini terwujud dalam ketidakseimbangan kekuatan-kekuatan sosial (*unequal exchange of social forces*), baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik. Ketidak seimbangan ini dimaknai dalam bentuk-bentuk ketidakadilan. Dimensi kekerasan ini dikembangkan lebih lanjut sebagai keberadaan eksklusi atau marginalisasi terhadap masyarakat oleh negara dalam pengelolaan kawasan konservasi. Konsep tersebut dikembangkan dari penjelasan (Syahra 2010), bahwa eksklusi sosial memiliki cakupan yang luas, sehingga dalam kajian ini *eksklusi dimaknai sebagai direnggutnya/hilangnya pengakuan terhadap eksistensi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi*. Sedangkan marginalisasi diartikan seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai pembatasan yang dimaknai sebagai

pembatasan peran masyarakat yang dalam hal ini dihubungkan dengan konteks pengelolaan kawasan konservasi. Kekerasan struktural dalam pemberitaan ditandai dari munculnya teks-teks yang memiliki makna yang menunjukkan adanya ketidakadilan negara terhadap masyarakat.

3. Kekerasan kultural yaitu sering juga disebut sebagai hegemoni (Kladden dalam Manik2003). Kekerasan terwujud akibat ketidakseimbangan dalam tukar menukar makna (*unequal exchange of meaning*). Pihak yang satu memproduksi makna dan pihak yang lain hanya menjadi konsumen tanpa dapat memberikan penolakan secara nyata. Kekerasan kultural dalam pemberitaan ditandai dari munculnya teks-teks yang memiliki makna yang menunjukkan adanya pemaksaan pengetahuan konservasi maupun penundukan negara terhadap masyarakat berbasis legitimasi yang disusun berdasarkan pengetahuan konservasi negara secara sepihak.

Uraian-uraian dimensi-dimensi kekerasan dalam konflik pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia yang didapatkan dari pemberitaan media tersebut sebelumnya, secara mendasar menggunakan cara kerja analisis isi (*CA = Content Analysis*). Krippendorff

mendefinisikan analisis isi sebagai teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data atas dasar konteksnya (Moleong 2014). Analisis isi yang dilakukan dalam penelitian ini mengikuti kerangka kerja pada analisis isi dari Krippendorff (2004) dan Istantia (2010) dengan tujuan melakukan analisis isi deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan suatu pesan atau teks tertentu (Rossy & Wahid2015), yang dalam hal ini difokuskan pada dimensi-dimensi kekerasan negara dalam pengelolaan kawasan konservasi. Analisis isi ini dilakukan dengan membaca dan memahami ide utama pada paragraf/alinea dalam isi pemberitaan untuk mendapatkan pokok-pokok kejadian kekerasan negara dalam pemberitaan konflik tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Dimensi – dimensi kekerasan pengelolaan kawasan konservasi dalam pemberitaan Kompas Online

Dimensi-dimensi kekerasan negara dalam pemberitaan konflik pengelolaan kawasan konservasi pada Kompas Online periode tahun 2011 – 2017 berjumlah 63 (enam puluh tiga) buah dari 42 (empat puluh dua) pemberitaan. Hasil analisis tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1. Hasil Analisis Dimensi Dimensi Kekerasan Pengelolaan Kawasan Konservasi dalam Pemberitaan Kompas Online

Table 1. Results of the Analysis of Dimensions of Violence in the Management of Conservation Areas in Kompas Online News

No.	KEKERASAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1.	Langsung	17	26,98
2.	Struktural	33	52,38
3.	Kultural	13	20,63
JUMLAH		63	100

Keterangan : Olah Data (2017)

Remarks : Primary Data (2017)

Pemberitaan Kompas *Online* mengenai kekerasan dalam pengelolaan kawasan konservasi didominasi oleh pemberitaan berdimensi kekerasan struktural, kemudian diikuti oleh dimensi kekerasan langsung dan yang terendah adalah dimensi kekerasan kultural. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembahasan terbanyak pemberitaan mengenai aspek-aspek ketidakadilan sosial dalam pengelolaan kawasan konservasi yang diberikan gambaran awal kejadian-kejadian kekerasan langsung.

Dimensi – dimensi kekerasan pengelolaan kawasan konservasi dalam pemberitaan Mongabay

Dimensi-dimensi kekerasan negara dalam pemberitaan konflik pengelolaan kawasan konservasi pada Mongabay periode tahun 2011 – 2017 berjumlah 74 (tujuh puluh empat) buah dari 33 (tiga puluh tiga) pemberitaan. Hasil analisis tersaji pada tabel berikut:

Pemberitaan Mongabay mengenai kekerasan dalam pengelolaan kawasan konservasi didominasi oleh pemberitaan berdimensi kekerasan struktural, kemudian diikuti oleh dimensi kekerasan kultural dan yang terendah adalah dimensi kekerasan langsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembahasan terbanyak pemberitaan mengenai aspek-aspek ketidakadilan sosial dalam pengelolaan kawasan konservasi tetap menjadi pusat perhatian dalam kejadian kekerasan negara. Pola pemaparan dimensi-dimensi kekerasan tersebut berbeda dengan pola pemaparan pada pemberitaan di Kompas *Online*

yang memberikan porsi kekerasan langsung lebih banyak dibandingkan kekerasan kultural. Strategi pemaparan yang berbeda ini disebabkan Mongabay merupakan portal berita daring khusus lingkungan sehingga menyajikan telaahan yang lebih mendalam terhadap aspek-aspek konflik terkait persepsi masyarakat terhadap suatu kejadian kekerasan negara meskipun tetap menggunakan dimensi kekerasan langsung sebagai pembawa, latar belakang maupun titik pembuka pada pemberitaannya.

Kekerasan negara atas nama Hak Penguasaan

Kekerasan negara dalam perspektif pemberitaan media massa menunjukkan bahwa aspek ketidakadilan merupakan hal pokok pembahasan. Ketidakadilan ini dalam perspektif umum terkait dengan distribusi manfaat dalam pengelolaan kawasan konservasi sebagai salah satu sumber daya yang dikuasai oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan terpendam dalam kebijakan pengelolaan kawasan konservasi untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Media massa mampu menyajikan kekerasan negara dalam dimensi-dimensi yang cukup utuh yang dapat dipergunakan untuk merekonstruksi kekerasan negara itu sendiri dalam berbagai aspek. Menurut Hasanah (2013), media juga berperan dalam merepresentasikan faktor penyebab serta dampak kekerasan menurut opini dan ideologi yang diusung media. Selanjutnya, proses ini dapat mempengaruhi kebijakan dan strategi penyelesaian tindak

Tabel 2. Hasil Analisis Dimensi Dimensi Kekerasan Pengelolaan Kawasan Konservasi dalam Pemberitaan Mongabay
Table 2. Results of the Analysis of Dimensions of Violence in the Management of Conservation Areas in Mongabay News

No.	KEKERASAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1.	Langsung	15	20,27
2.	Struktural	37	50,00
3.	Kultural	22	29,73
JUMLAH		73	100

Sumber : Olah Data (2017)

Remarks : Primary Data (2017)

kekerasan. Merunut dari hal-hal tersebut, maka kekerasan negara muncul disebabkan penguasaan dalam pengelolaan kawasan konservasi sebagai sumber daya alam. Konteks sebagai sumber daya alam menempatkan kawasan konservasi dipandang dalam perspektif utama sebagai aspek produksi.

Penguasaan negara terhadap sumber daya alam, pada hakikatnya mengacu pada pasal 33 UUD 1945 yang menurut Mawuntu (2012) merupakan pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia karena didalamnya memuat ketentuan tentang hak penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dan bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kawasan konservasi merupakan salah satu sumber daya alam penting bagi negara dan memiliki peran penting bagi hajat hidup orang banyak, baik secara ekologi, ekonomi maupun sosial sehingga dikuasai negara.

Mawuntu (2012), menjelaskan lebih lanjut bahwa hak penguasaan negara terkait dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut :

- a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
- c. Mencegah tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Kewajiban-kewajiban tersebut, tampak belum terpenuhi dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Masyarakat di sekitar kawasan konservasi dan umumnya di sekitar kawasan hutan masih berada pada taraf miskin (Winarwan et al. 2011; Cahyono 2012). Berdasarkan observasi Center for International Forestry Research (CIFOR) yang disampaikan oleh (Wollenberg dalam Winarwan et al. 2011), dari 220 juta populasi penduduk Indonesia, terdapat 48,8 juta diantaranya yang tinggal di kawasan hutan negara dan sekitar 10,2 juta diantaranya dianggap miskin.

Begitu pula permasalahan jaminan terhadap hak-hak rakyat maupun ketidakadilan yang diderita masyarakat akibat adanya pihak-pihak yang menghilangkan hak masyarakat untuk menikmati kekayaan alam yang juga terdapat di kawasan konservasi seperti penguasaan atas air, penguasaan atas jasa lingkungan kawasan konservasi, hasil hutan bukan kayu dan lain-lain. Hal tersebut ditunjukkan dengan bermunculannya tipologi-tipologi konflik kawasan hutan tidak hanya antara masyarakat dengan negara tetapi juga masyarakat dengan pemegang ijin maupun badan usaha milik negara (BUMN) pengelolaan hutan yang diberikan oleh negara termasuk kawasan konservasi (Soegiri 2017).

Model pengelolaan kawasan konservasi yang melegitimasi kuasa penuh negara tersebut juga dapat ditinjau dari pandangan Robinson (2011), yaitu munculnya istilah "*human well-being*" yang dapat diartikan sebagai kesejahteraan manusia atau kalau boleh diartikan bebas sebagai kemashlahatan umat dengan catatan kata "*human*" menunjukkan perspektif antroposentris yang menunjukkan bahwa kemanfaatan itu hanyalah bagi manusia. Pengelolaan kawasan konservasi oleh negara memperoleh label kesejahteraan manusia/kemashlahatan umat, menjadikannya sebagai sebuah fungsi yang membenarkan kekerasan merupakan tujuan yang mulia. Mengambil kembali pengertian kekerasan oleh

Fisher et al.(2000) dimana kekerasan didefinisikan sebagai tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan dan/atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh. Definisi tersebut akan menjadi batasan-batasan dalam melakukan analisis kekerasan-kekerasan yang dilakukan negara terhadap masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Peluso (1996) memberikan pandangan mengenai kekerasan negara, bahwa kekerasan tersebut boleh jadi merupakan kontribusi dari lembaga-lembaga konservasi internasional sebagai hasil dari upaya mereka untuk melindungi wilayah sumber daya alam dan menciptakan “stabilitas” dalam kapabilitas negara untuk mengatur. Pada saat yang sama, konservasi dapat pula menjadi strategi negara untuk mengatur masyarakat dan wilayah.

Relasi negara dengan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, sesungguhnya memiliki perkembangan dinamis. Eksistensi masyarakat yang tidak diakui dalam kawasan konservasi telah banyak dipaparkan oleh Colchester (2009) dalam bukunya yang berjudul asli “Salvaging Nature, Indigenous People, Protected Areas and Biodiversity Conservation” yang telah dialihbahasakan dengan judul “Menyelamatkan Alam, Penduduk Asli, Kawasan Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati”. Pertarungan mengenai ruang dan penguasaan terhadap sumber daya alam yang berada didalamnya, bermuara dari cara pandang yang berbeda terhadap obyek material kawasan konservasi itu sendiri. Negara menganggap kawasan konservasi sebagai ruang dan pengetahuan kosong yang dipenuhi keunikan keanekaragaman hayati yang eksotis, sementara masyarakat lokal memandang sebagai ruang dan pengetahuan hidup yang sangat dikenali, yang berisi sumber daya untuk menyokong kehidupannya.

Ketika pendatang memiliki legitimasi kuasa dan dapat hadir sebagai aparat negara, maka eksklusi sosial terjadi pada masyarakat lokal. Dimensi kekerasan langsung yang dapat teramati dalam kejadian eksklusi sosial antara lain, pengusiran, penangkapan, pemidahan dan lain-lain. Menurut Nurdin (2015), tersingkirnya masyarakat karena prasangka dan stigmatisasi kebijakan dan struktur masyarakat yang lebih luas. Eksklusi sosial terjadi ketika ada kelompok mengalami perbedaan perlakuan, dimana setiap manusia berhak menerima perlindungan dan kesejahteraan.

Eksklusi sosial juga merupakan proses dan hasil (Nurdin 2015). Eksklusi sosial pengelolaan kawasan konservasi sebagai proses dapat terjadi ketika aparat negara pengelola kawasan konservasi menghambat pencapaian keperluan hidup, pembangunan manusia dan hak-hak yang sama sebagai warganegara. Sedangkan eksklusi sosial pengelolaan kawasan konservasi sebagai hasil yaitu suatu keadaan di mana masyarakat tidak mampu berperan sepenuhnya dalam pengelolaan kawasan karena identitas sosial yang disematkan seperti sebagai perambah, pemburu satwa liar pada kawasan yang dilindungi, pencuri kayu dan lain sebagainya.

Relasi kuasa negara juga terus diproduksi dan direproduksi melalui induksi untuk mempertahankan dominansi pengetahuan pengelolaan kawasan konservasi yang ditentukan oleh negara. Dalam hal ini, telah menjadi standar kegiatan tetap untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan yang juga melibatkan bentuk-bentuk pendidikan konservasi, penyuluhan konservasi, sosialisasi peraturan konservasi dan lain sebagainya. Selain itu kegiatan pemberdayaan masyarakat, di sisi lain merupakan sarana pertukaran (*trade off*) pengaruh untuk memperoleh dukungan dan menginduksi pengetahuan. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, biasanya dipusatkan pada

komunitas-komunitas yang memberikan dukungan positif terhadap kegiatan pengelolaan kawasan bahkan diajak untuk terus menyebarluaskan pengetahuan tersebut dalam lingkup yang lebih besar. Hal tersebut dilakukan tanpa memperhatikan lokalitas dan pengetahuan lokal masyarakat sehingga terjadilah marginalisasi pengetahuan lokal masyarakat mengenai konservasi.

Kajian Galudra dan Sirait (2006) merunut sejarah penguasaan dan pengelolaan negara terhadap kawasan hutan dengan penekanan pada era pemerintah kolonial Belanda saat memperkenalkan politik etik dengan basis kepentingan ekonomi. Dominasi negara dalam pengelolaan kawasan hutan pada masa kolonial telah mengabaikan kearifan lokal pengelolaan hutan yang telah ada di masyarakat. Pengetahuan lokal tersebut tidak hanya termarginalisasikan tetapi dalam beberapa kasus terkriminalisasikan misalnya sistem pertanian lahan basah yang disebut sonor yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Suaka Margasatwa Padang Sugihan Sumatera Selatan. Sistem sonor ini makin menghilang dan ditinggalkan karena penggunaan api dalam penyiapan lahan dianggap tindakan kejahatan lingkungan, padahal sistem ini telah terlacak dalam 3 (tiga) generasi sebagai sistem pertanian di lahan basah dengan produktivitas tinggi.

Dengan demikian marginalisasi pengetahuan ini terjadi secara sistematis dan terlegitimasi kuat sebagai kewenangan melalui perangkat kebijakan dan dilaksanakan oleh aparat gabungan yang represif. Awang (2005) memberikan penjelasan yang sangat terang bagaimana pengetahuan masyarakat ini hilang melalui jaring-jaring penguasaan dan kewenangan negara untuk mendistribusikan pengetahuan negara atas sumber daya hutan kepada masyarakat yang kemudian secara tidak sadar pengetahuan negara tersebut menjadi pengetahuan masyarakat juga.

Represi pengetahuan adalah istilah yang digunakan oleh Awang (2005) ketika pada masyarakat muncul sikap pikir yang sama persis dengan petugas kehutanan dan masyarakat tidak berani melakukan beda pendapat dengan pengetahuan negara. Kontestasi pengetahuan negara dengan pengetahuan masyarakat ini ditunjukkan oleh Awang (2005) ketika model ekosistem hutan-kebun pada kawasan hutan lindung Gunung Betung yang dilakukan masyarakat dinilai sebagai antiklimaks deforestasi karena model ekosistem tersebut tidak dikenal dalam nomenklatur pengetahuan kehutanan dan nomenklatur pengetahuan negara. Ketika sebuah model pengelolaan alam tidak dikenal oleh pengetahuan negara, maka timbullah pola represi agar pengetahuan negara yang diikuti. Pola represi tersebut terkadang disertai ancaman konsekuensi hukum yang mengarah stigma sebagai tindakan kejahatan/pidana.

Awang (2005) menjelaskan lebih lanjut mengenai dampak-dampak relasi pengetahuan dominan negara terhadap pengetahuan masyarakat tentang hutan yang berakibat pada urusan-urusan nomenklatur tanpa memperhatikan substansi. Urusan-urusan nomenklatur inilah yang menjadi alat paksa negara kepada masyarakat dalam pemikiran tentang konservasi maupun pengelolaan kawasan konservasi. Gambaran yang diberikan oleh Awang (2005) tersebut yang akan membuka jalan untuk menguraikan pernyataan Adiwibowo dalam Colchester (2009) yang menyebutkan bahwa konservasi ternyata bukan hanya masalah teknis tentang pengelolaan zonasi, perlindungan populasi satwa liar langka serta pengelolaan ekosistem. Di balik semua itu terdapat tarik menarik kepentingan, relasi kekuasaan yang kompleks, serta pertarungan untuk akses sumber-sumber alam. Memahami hal tersebut menempatkan pemakluman bahwa konflik dalam pengelolaan kawasan konservasi merupakan sebuah keniscayaan.

Bertumpu pada mandat dan konstruksi sosial, paradigma tradisional dalam pengelolaan kawasan konservasi memunculkan representasi alam beserta atributnya dalam wujud pengelola kawasan konservasi. Representasi sebagai wakil alam ini dikonstruksi melalui proses politik yang mengedepankan mandat dan kekuasaan atau kewenangan. Dengan demikian pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, sejak awal dibentuknya merupakan domain negara dan sangat sentralistik. Bahkan sampai saat ini di era reformasi dan otonomi daerah, kawasan konservasi merupakan kewenangan pusat dan tidak didesentralisasikan. Keberadaan kawasan konservasi di daerah mengundang berbagai benturan kepentingan karena kawasan-kawasan konservasi tersebut dikelola oleh suatu satuan kerja pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sama sekali tidak mempunyai hubungan struktural dan pertanggungjawaban dengan perangkat birokrasi di daerah kecuali hanya untuk koordinasi.

Konsekuensi yang harus ditanggung para pengelola kawasan konservasi adalah bahwa pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, sebagaimana yang ada dalam peraturan perundang-undangan, sedikit banyak mencerminkan pandangan klasik tentang kawasan konservasi. Kebanyakan kawasan konservasi di Indonesia masih memprioritaskan kegiatannya pada perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati serta pemanfaatannya dalam bentuk pengembangan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan kepariwisataan alam. Posisi ideologis konservasi tersebut terbukti menimbulkan banyak masalah sosial.

Wiratno et al. (2001) memberikan gambaran bahwa penyebab penting yang menjadi perhatian bahwa tidak berjalannya upaya-upaya konservasi di

Indonesia, adalah ideologi konservasi dari luar yang dilakukan tanpa proses adaptasi dengan kondisi spesifik lokal. Narasi tersebut menunjukkan sebuah pengakuan penting bahwa wujud konservasi di Indonesia merupakan wajah konsep dari luar yang m e n d a p a t k a n m a s a l a h u n t u k "dibumikan". Pemahaman tersebut kemudian melahirkan gagasan mengenai transformasi konservasi yang manusiawi. Gagasan tersebut mencoba mengangkat aspek-aspek kelola sosial sebagai pendamping kelola ekologis yang sebelumnya menjadi paradigma utama.

Perhatian terhadap aspek-aspek sosial ini, memberikan kesadaran bahwa konflik ini berada di antara kewajiban etika yang menimbulkan teka-teki konservasionis (disebut "perdebatan konservasi baru") (Minteer & Miller et al. 2010). Tarik menarik kepentingan antara aspek sosial dengan representasi ekologis yang menyebabkan pengelolaan kawasan konservasi juga terkait dengan posisi-posisi etis. Menurut Robinson (2011), konservasi dan organisasi konservasi diminta untuk membenarkan secara etis pilihan yang mereka buat berdasarkan pilihan ideologisnya. Apakah konservasi dapat dipertahankan secara etis jika mereka mengabaikannya sendi-sendi kehidupan masyarakat? Dalam tindakan tersebut, kawasan konservasi jika dianggap sebagai sumber daya, seharusnya benar-benar dirancang juga untuk mengurangi kemiskinan masyarakat lokal, memperbaiki penghidupan manusia, dan mempromosikan keadilan sosial dan integritas budaya. Dalam penjelasan lain, ahli konservasi ditantang untuk memeriksa apakah tindakan dan pilihan mereka 'benar' atau 'salah' terhadap pilihan etis tersebut.

Aspek-aspek kelola sosial tersebut sebelumnya juga muncul dengan adanya petunjuk bahwa konflik pengelolaan kawasan konservasi tetaplah menyebar. Saran dari Awang (2007) sangat menarik

untuk ditindaklanjuti, bahwa pembahasan pengelolaan sumber daya hutan seharusnya melibatkan telaah tentang hubungan negara dengan rakyat yang menjadi dimensi sosiologis.

Dalam pembahasan pengelolaan hutan khususnya kawasan konservasi, hubungan antara negara dengan rakyat adalah tentang relasi kuasa yang terlegitimasi, tentang norma-norma yang disusun negara untuk diberlakukan kepada rakyat dalam bentuk kebijakan. Satu sisi pembuka, menanggapi kewajiban etis para konservasionis yang secara historis mengikuti dua pendekatan umum: (1) membangun taman dan kawasan lindung lainnya untuk melindungi spesies liar dan sistem alam, dan (2) mempromosikan pengekanan pada panen dan konsumsi spesies liar dan produknya. Kedua pendekatan tersebut mempengaruhi akses masyarakat terhadap sumber daya alam, baik dengan tidak memberikan kesempatan untuk menggunakan area tertentu (seperti di kawasan lindung), atau dengan mengurangi tingkat pemanfaatan (Robinson 2011). Pembatasan akses menggunakan konstruksi pengetahuan dari luar terbukti terbukti menimbulkan ketegangan-ketengangan yang memicu konflik ketika diterapkan dalam pengelolaan kawasan lindung/kawasan konservasi di Indonesia.

Dari uraian tersebut sebelumnya, negara dalam relasi kuasa, merupakan penanggung jawab utama posisi-posisi etis pengelolaan kawasan konservasi. Pilihan ideologis juga membawa konsekuensi agar posisi-posisi etis terhadap entitas manusia dan non manusia dapat terpetakan dengan baik. Bentangan pemetaan posisi etis ini akan menghindarkan ketidakadilan sosial maupun ketidakadilan ekologis. Hal ini karena pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya tentang relasi manusia dengan manusia, tetapi juga relasi manusia dengan entitas non manusia yang dalam gambaran besarnya sebagai suatu ekosistem sebenarnya

mencakup juga manusia dalam bagiannya.

Manusia adalah bagian dari gambaran besar suatu ekosistem dan juga menjadi komponen ekologisnya. Dalam kerangka pemahaman tersebut, seharusnya manusia juga dapat membangun pengakuan kepada entitas non-manusia baik sebagai kesadaran maupun sebagai nilai moral. Pengakuan saja sebenarnya tidak cukup, diperlukan pula penghormatan sebagai panduan moral. Keadilan ekologis merupakan konsep yang harus dijabarkan bersama keadilan sosial, tidak hanya dalam gambaran sempit pengelolaan kawasan konservasi tetapi juga dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Penelusuran lebih lanjut pada pelaksana pemegang mandat sektor kehutanan menunjukkan bahwa konflik dalam pengelolaan kawasan konservasi secara umum dipahami sebagai konflik kepentingan terhadap ruang kelola yang boleh jadi beririsan tapi tidak memiliki deliniasi yang jelas apalagi disepakati bersama. Selain itu juga muncul pemahaman konflik tersebut sebagai ekspresi adanya kemiskinan maupun tindakan keserakahan oknum. Secara garis besar pengelolaan aspek relasi sosial menjadi sorotan utama.

Aspek relasi sosial ini menyebabkan konstruksi penanganan konflik dalam pengelolaan kawasan konservasi lebih diarahkan pada parameter regulatif dan parameter kultural. Efektifitas penanganan konflik sendiri lebih disandarkan pada kemampuan untuk membangun komunikasi/pendekatan positif kepada masyarakat (pihak ketiga) untuk membangun kolaborasi atau mewujudkan kemitraan yang dapat memberikan *mutual trust*, *mutual respect* dan *mutual benefit*.

Titik tumpu penanganan konflik pada filosofi konservasi untuk mengajak, membujuk, merayu, merangkul, menyantuni didorong oleh kesadaran bahwa pendekatan represif sudah tidak populer. Hal ini menunjukkan perkembangan positif untuk

mereduksi konflik yang melibatkan kekerasan langsung, meskipun masih muncul tanggapan tentang perlunya mempertahankan hal-hal prinsip dalam pengelolaan hutan. Dengan demikian, pengelolaan hutan secara umum maupun khususnya pengelolaan kawasan konservasi didukung untuk menemukan jati dirinya (kembali?) melalui pendekatan kultural yang bersumber dari kekhasan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal tersebut membangun optimisme bahwa konflik dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat ditangani dengan baik.

Kesimpulan

Dimensi-dimensi kekerasan negara dapat cukup utuh diuraikan melalui perspektif pemberitaan di media massa. Hal tersebut sangat membantu untuk lebih memahami konflik yang melibatkan hubungan antara negara dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Sumber-sumber kekerasan negara baik kekerasan langsung, kekerasan struktural maupun kekerasan kultural disebabkan penguasaan pengelolaan kawasan konservasi sebagai sumber daya alam yang seharusnya secara ideal membawa kewajiban-kewajiban bagi negara untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, akan tetapi kewajiban-kewajiban negara tersebut belum dapat terpenuhi sehingga memicu munculnya konflik. Untuk menangani konflik tersebut diperlukan dukungan untuk menemukan jati diri pengelolaan kawasan konservasi melalui pendekatan kultural yang bersumber dari kekhasan kearifan lokal sehingga membangun optimisme bahwa konflik dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat ditangani dengan baik.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih yang setulus-tulusnya kami haturkan kepada para pembimbing penelitian ini,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas beasiswa yang diberikan untuk melaksanakan studi dan penelitian serta dukungan penuh dari teman-teman di Laboratorium Pengelolaan Kawasan Konservasi Fakultas Kehutanan UGM.

Daftar Pustaka

- Alimahomed-Wilson J, Williams DM. 2016. State Violence, Social Control and Resistance Journal of Social Justice, Vol. 6.
- Awang SA. 2005. Negara, Masyarakat dan Deforestasi (Konstruksi Sosial atas Pengetahuan dan Perlawanan Petani Terhadap Kebijakan Pemerintah. Ringkasan Disertasi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Awang SA. 2007. Sosiologi kehutanan dan lingkungan. Buku Ajar. Laboratorium Ekologi Sosial dan Politik SDH. Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta.
- Fisher, Simon, Abdi D, Ludin J, Richard S, Williams S, Sue. 2000. Mengelola Konflik ketrampilan dan strategi untuk bertindak. alih bahasa : s.n. kartikasari dkk. penyunting : s.n. kartikasari. zed books. the british council. jakarta.
- Cahyono E. 2012. Konflik kawasan konservasi dan kemiskinan struktural. Jurnal Politika 8 (1): 7-41.
- Colchester M. 2009. Menyelamatkan alam. Penduduk Asli, Kawasan Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati. Working Group Conservation for People, WALHI.
- Galtung J. 1990. Cultural violence. Journal of Peace Research vol. 27 no. 23. Pp 291-305
- Galtung J. 2004. Violence, war, and their impact on visible and invisible effects of violence. Polylog : Forum on Intercultural Philosophy dalam <http://them.polylog.org/5/fgj-en.htm> dan [www.transcend.org/TRRECBAS .htm](http://www.transcend.org/TRRECBAS.htm) diakses Januari 2014
- Galudra G, Sirait M. 2006. The unfinished debate : Sociolegal and science discourse on forest land-use and tenure policy in 20th century Indonesia. Paper to be presented to the 11th Biennial Congress of The International Association for The Study of Common Property, Bali, Indonesia, 19-23 June 2006.
- Hasanah H. 2013. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga : perspektif pemberitaan media. Jurnal SAWWA 9(1): 159-178.
- Istania R. 2010. Pengantar pendekatan content analysis. Mata Kuliah Dinamika Politik Lokal. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Lembaga Administrasi Negara.
- Jacoby T. 2008. Understanding conflict and violence. theoretical and interdisciplinary approaches. Routledge. Taylor and Francis Group. London and New York.
- Krippendorff K. 2004. content analysis. an introduction to its methodology. Second Edition. SAGE Publication. London.
- Kuswijayanti ER, Dharmawan AH, Kartodihardjo H. 2007. Krisis-krisis socio-politico- ecology di kawasan konservasi. Studi Ekologi Politik di Taman Nasional Gunung Merapi. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia: 41-66.

- Mawuntu JR.2012.Konsep penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan putusan mahkamah konstitusi. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. XX, No. 3. pp. 11 – 21.
- MenjivarC.2016. A framework for examining violence. In Gender Through The Prism of Difference edited by Maxine Baca Zinn, Pierette Hondagneu – Sotelo, Michael A. Messner and Amy M. Denissen. Oxford University Press.New York.p 131.
- Manik VJ. 2003. Reproduksi kekerasan tanpa akhir : Sebuah pandangan terhadap ketidakmampuan negara mengelola kekerasan. Jurnal Kriminologi Indonesia3 (1):1 – 12.
- Marina I. Dharmawan AH.2011. Analisis konflik sumber daya hutan di kawasan konservasi. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia :90 – 96
- Minteer BA, Miller TR.2010. The new conservation debate: Ethical foundations, strategic trade-offs, and policy opportunities. Biological Conservation (Article in press).
- Moleong LJ.2014.Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Cetakan ke – 32. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nasution M.2008. Konflik penguasaan tanah dan hasil hutan pra dan pasca penetapan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG). Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 9 (3): 311 – 324.
- Nurdin FM.2015.Eksklusi sosial dan pembangunan.Makna, f o k u s d a n d i m e n s i u n t u k k a j i a n sosiologis.Makalah.Kongres II Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia dan Konferensi Nasional Sosiologi Indonesia IV. Manado, 20-23 Mei 2015.
- Peluso NL.1993. Coercing conservation?. The politics of state resource control. Global Environmental Change June 1993, hal 199 – 217.
- Peluso.1996. Reserving value : Conservation ideology and state protection of resources. In : E. M. Du Puis and P. Vandergeest (eds). Creating The Countryside. Philadelphia Temple University Press. pp. 135 – 165.
- Prabowo SA, Basuni S,Suharjito D.2010. Konflik tanpa henti: Permukiman dalam kawasan Taman Nasional Halimun Salak. JMHT 16(3): 137–142.
- Redpath SM, Young J, Evely A, Adams WM, Sutherland WJ, Whitehouse A, Amar A, Lambert RA, Linnell JDC, Watt A, Gutierrez RJ. 2013. Understanding and managing conservation conflicts. Trends in Ecology and Evolution 28.
- Ridwan A.2009. Sistem prevensi *school violence* di Madura berbasis *Galtung Conflict Triangle*. Islamica 3(2): 101 - 108.
- Robinson JG. 2011. Ethical pluralism, pragmatism, and sustainability in conservation practice. Biological Conservation 144: 958 - 965
- Rossy AE,Wahid U.2015.Analisis isi kekerasan seksual dalam pemberitaan media *online* detik.com.Jurnal Komunikasi. 7(2): 152 – 164.
- Soegiri EW.2017. Kehadiran negara dalam penanganan konflik tenurial di kawasan hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Syahrar.2010. Eksklusi sosial : Perspektif baru untuk memahami deprivasi dan kemiskinan. Jurnal Masyarakat dan Budaya. Edisi Khusus.
- Weber M.1946.Politics as a vocation. Translated and edited by H.H. Gerth and C.W. Mills. Essays in Sociology.Oxford University Press. pp. 77 – 128.
- Winarwan D, Awang SA, Keban YT,Semedi P.2011. Kebijakan pengelolaan hutan, kemiskinan struktural dan perlawanan masyarakat.Kawistara 1(3): 213 – 320.
- Wiratno, Indriyo D, Syarifudin A, Kartikasari A.2001. Berkaca di cermin retak.Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional. Forest Press, The Gibbon Foundation, Indonesia, PILI – NGO Movement.
- Wulan YC, Yasmi Y, Purba C, Wollenberg E.2004.Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 – 2003. CIFOR. Bogor.